

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan 2010a, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009*, 034/02/LHP/XV/05/2010, Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2010b, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.
 - 2011, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010*, 27/LHP/XV/2011, Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2012, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011*, 24/LHP/XV/05/2012, Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2013, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012*, 45/LHP/XV/05/2013, Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2014, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013*, 69/LHP/XV/05/2014, Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2015, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014*, 74/LHP/XV/05/2015, Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2016, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015*, 56/LHP/XV/05/2016.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR 2014, *SAL sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan dalam APBN*.
- Creswell, J.W. 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th edn, SAGE Publication, Inc.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2007, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05PB/2007 tentang Prosedur Penyusunan LKPP*.
- 2009, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahahara Umum Negara*.
 - 2011, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih*.
 - 2014, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih*.

- 2015a, *KEP-239/PB/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015-2019.*
 - 2015b, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih.*
 - 2015c, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2015 tentang Perubahan atas PER-22/PB/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih.*
 - 2015d, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2015 tentang Prosedur Penyusunan LKPP.*
- Direktorat Penyusunan Anggaran 2013, *Dasar-Dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia.*
- Direktorat Penyusunan APBN 2014, *Postur APBN Indonesia*, Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta.
- Halim, A. dan Bawono, I.R. 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. dan Kusufi, M.S. 2014, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, 4th edn, Salemba Empat, Jakarta.
- Hennink, M., Hutter, I. dan Bailey, A. 2010, *Qualitative Research Methods*, SAGE Publication, Inc.
- Herdianto, D. 2015, 'Pengaruh Faktor Teknis dan Organisasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)', Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2007, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
- 2010, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Saldo Anggaran Lebih.*
 - 2011a, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.*
 - 2011b, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*

- 2013a, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.*
- 2013b, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.*
- 2014a, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.*
- 2014b, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.*
- 2015, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Perkiraan Defisit yang melampaui target defisit APBN Tahun 2015 dan tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit APBN TA 2015.*

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2012, *Buletin Teknis dan Interpretasi SAP*, viewed 30 March 2016, <<http://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-dan-interpretasi-psap/>>.

Kusufi, M.S. 2013, 'Tinjauan atas PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP yang Terkait dengan Laporan Operasional', dalam A. Halim dan M.S. Kusufi (penyunting), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Salemba Empat, Jakarta.

Kusufi, M.S. dan Asrihapsari, A. 2013, 'Tinjauan atas PSAP yang Terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan', dalam A. Halim dan M.S. Kusufi (penyunting), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Salemba Empat, Jakarta.

Mahmudi 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, UPP KPN, Yogyakarta.

Mardiasmo 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

perpustakaan bappenas n.d., *Sisa anggaran untuk cadangan*, perpustakaan.bappenas, viewed 23 June 2016, <<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5635/Sisa%20anggaran%20untuk%20cadangan.htm>>.

- Purwohartono, D. 2015, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Dampaknya terhadap Manfaat Pelaporan Keuangan', Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia 1999, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.*
- 2003a, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2001.*
 - 2003b, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
 - 2004a, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
 - 2004b, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
 - 2005, *Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
 - 2007, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang.*
 - 2009, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.*
 - 2010, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
 - 2014, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.*
 - 2016, *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015.*
- Ruwanti, S. dan Kusufi, M.S. 2013, 'Kerangka Konseptual untuk Akuntansi Sektor Publik: Arti Pentingnya Guna Pengembangan Akuntansi Sektor Publik', dalam A. Halim dan M.S. Kusufi (penyunting), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suharna, I. 2015, 'Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2013', Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wicaksono, B. 2012, 'Analisis Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008-2010', Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.